

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Konsep Kesejahteraan Sosial**

##### **2.1.1 Pengertian Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan Sosial berasal dari kata “Sejahtera”. Sejahtera ini mengandung pengertian dari bahasa Sanskerta “Catera” yang berarti payung. Dalam konteks ini, kesejahteraan yang terkandung dalam arti “Catera” (payung) adalah orang yang sejahtera yaitu orang yang dalam hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin. Sedangkan sosial berasal dari kata “Socius” yang berarti kawan, teman, dan kerja sama. Orang yang sosial adalah orang dapat berelasi dengan orang lain dan lingkungannya dengan baik. Jadi kesejahteraan sosial dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungan secara baik. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander dalam Fahrudin (2014:9) adalah sebagai berikut :

Kesejahteraan sosial adalah sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan sosial dan institusi-institusi yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok guna mencapai standar hidup dan kesehatan yang memadai dan relasi-relasi personal dan sosial sehingga memungkinkan mereka dapat mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan sepenuhnya selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa kesejahteraan sosial merupakan suatu sistem yang terorganisasi yang dibuat untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk mencapai standar hidup yang sesuai sehingga akan mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan.

### **2.1.2 Tujuan Kesejahteraan Sosial**

Menurut Schneiderman (1972) tiga tujuan utama dari sistem kesejahteraan sosial yang sampai tingkat tertentu tercermin dalam semua program kesejahteraan sosial, yaitu pemeliharaan sistem, pengawasan sistem dan perubahan sistem. Adapun tujuan lain dari kesejahteraan sosial mempunyai beberapa tujuan yaitu:

1. Untuk mencapai kehidupan yang sejahtera dalam arti tercapainya standar kehidupan pokok seperti sandang, perumahan, pangan, kesehatan, dan relasi-relasi sosial yang harmonis dengan lingkungannya.
2. Untuk mencapai penyesuaian diri yang baik khususnya dengan masyarakat di lingkungannya, misalnya dengan menggali sumber-sumber, meningkatkan, dan mengembangkan taraf hidup yang memuaskan.

Definisi diatas menjelaskan bahwa tujuan dari kesejahteraan sosial yaitu terpenuhinya kebutuhan hidup seperti sandang, pangan, kesehatan dan juga terjalinnya relasi yang baik juga bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

### **2.1.3 Fungsi Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan memiliki fungsi yang bertujuan untuk menghilangkan atau mengurangi tekanan-tekanan yang diakibatkan terjadinya perubahan-perubahan

sosio-ekonomi, menghindarkan terjadinya konsekuensi-konsekuensi sosial yang negatif akibat pembangunan serta menciptakan kondisi-kondisi yang mampu meningkatkan pendorong kesejahteraan masyarakat. Adapun fungsi-fungsi kesejahteraan sosial menurut (Fahrudin,2018:2) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Penegahan (*Preventive*)

Kesejahteraan sosial ditujukan untuk memperkuat individu, keluarga, dan masyarakat supaya terhindar dari masalah-masalah sosial baru. Dalam masyarakat transisi, upaya pencegahan ditekankan pada kegiatan-kegiatan untuk membantu menciptakan pola-pola baru dalam hubungan sosial serta lembaga-lembaga sosial baru.

2. Fungsi Penyembuhan (*Curative*)

Kesejahteraan sosial ditunjukkan untuk menghilangkan kondisi-kondisi ketidakmampuan fisik, emosional, dan sosial agar orang yang mengalami masalah tersebut dapat berfungsi kembali secara wajar dalam masyarakat. Dalam fungsi ini tercakup juga fungsi pemulihan (Rehabilitasi).

3. Fungsi Pengembangan (*Development*)

Kesejahteraan sosial berfungsi untuk memberikan sumbangan langsung ataupun tidak langsung dalam proses pembangunan atau pengembangan tatanan dan sumber-sumber daya sosial dalam masyarakat.

4. Fungsi Penunjang (*Supportive*)

Fungsi ini mencakup kegiatan-kegiatan untuk membantu mencapai tujuan sektor atau bidang pelayanan kesejahteraan sosial yang lain.

#### **2.1.4 Komponen-Komponen Kesejahteraan Sosial**

Kesejahteraan sosial juga memiliki komponen-komponen yang di mana dalam semua kegiatan atau usaha dari kesejahteraan sosial mempunyai ciri-ciri tertentu yang membedakan kegiatan-kegiatan lain yaitu:

1. Organisasi Formal

Usaha kesejahteraan sosial terorganisasi secara formal dan dilaksanakan oleh organisasi/badan sosial yang formal pula. Kegiatan yang dilakukan memperoleh pengakuan masyarakat karena memberikan

pelayanan secara teratur, dan pelayanan yang diberikan merupakan fungsi utamanya.

## 2. Pendanaan

Tanggung jawab dalam kesejahteraan sosial bukan hanya tanggung jawab pemerintah melainkan juga tanggung jawab masyarakat. Mobilisasi dana dan sumber (*Fund raising*) merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat secara keseluruhan.

## 3. Tuntutan Kebutuhan Manusia

Kesejahteraan sosial harus memandang kebutuhan manusia secara keseluruhan, dan tidak hanya memandang manusia dari satu aspek saja. Hal ini yang membedakan pelayanan kesejahteraan sosial dengan yang lainnya.

## 4. Profesionalisme

Pelayanan kesejahteraan sosial dilaksanakan secara profesional berdasarkan kaidah ilmiah, terstruktur, sistematis, dan menggunakan metoda dan teknik-teknik pekerjaan sosial dalam praktiknya.

## 5. Kebijakan/Perangkat Hukum/Perundang-undangan

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang oleh seperangkat perundang-undangan yang mengatur syarat memperoleh, proses pelayanan, dan pengakhiran pelayanan.

## 6. Peranserta Masyarakat

Usaha kesejahteraan sosial melibatkan peranserta masyarakat agar dapat berhasil dan memberi manfaat kepada masyarakat.

## 7. Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial

Pelayanan kesejahteraan sosial harus ditunjang dengan data dan informasi yang tepat. Tanpa data informasi yang tepat maka pelayanan akan tidak efektif dan tidak tepat sasaran.

## **2.2 Konsep Pekerjaan Sosial**

### **2.2.1 Pengertian Pekerjaan Sosial**

Pekerjaan sosial sebagai suatu ilmu yang berawal dari perkembangan pemikiran dari para filantropis yang sekaligus juga merupakan relawan. Pekerjaan sosial merupakan profesi pertolongan yang menekankan pada keberfungsian sosial manusia dalam berinteraksi dan berinterelasi dengan lingkungan sosialnya. Penekanan pada aspek keberfungsian sosial manusia inilah yang menjadi pembeda antara profesi pekerjaan sosial dengan profesi pertolongan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mendefinisikan pekerjaan sosial profesional sebagai berikut:

Seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.

Definisi lain pekerjaan sosial menurut Zastrow dalam Suharto (2009:1) yang mengemukakan bahwa definisi pekerjaan sosial, yaitu “Pekerjaan sosial adalah aktivitas profesional untuk menolong individu, kelompok, dan masyarakat dalam meningkatkan atau memperbaiki kapasitas mereka agar

berfungsi sosial dan menciptakan kondisi-kondisi masyarakat yang kondusif untuk mencapai tujuan tersebut”

Definisi diatas pekerjaan sosial merupakan sebuah profesi yang membantu individu, kelompok, atau masyarakat dalam menyelesaikan masalahnya dengan berbagai macam metode yang dilakukan.

### **2.2.2 Tujuan Pekerjaan Sosial**

Tujuan dari pekerjaan sosial secara umum yaitu untuk membantu individu, kelompok, dan masyarakat melalui pelayanan sosial yang mengalami hambatan sosial/keberfungsian sosialnya tidak berjalan dengan seharusnya. Tujuan praktik pekerjaan sosial menurut NASW (Fahrudin, 2014:66) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kemampuan-kemampuan orang untuk memecahkan masalah, mengatasi (coping), perkembangan.
2. Menghubungkan orang dengan sistem-sistem yang memberikan kepada mereka sumber-sumber yang memberikan kesempatan-kesempatan.
3. Memperbaiki keefektifan dan bekerjanya secara manusiawi dari sistem-sistem yang menyediakan orang dengan sumber-sumber pelayanan.
4. Mengembangkan dan memperbaiki kebijakan sosial.
5. Meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan, penindasan, dan bentuk-bentuk ketidakadilan sosial lainnya.
6. Mengusahakan kebijakan, pelayanan, dan sumber-sumber melalui advokasi dan tindakan-tindakan sosial dan politik yang meningkatkan keadilan sosial ekonomi.
7. Mengembangkan dan menggunakan penelitian, pengetahuan, dan keterampilan yang memajukan praktik pekerjaan sosial.
8. Mengembangkan dan menerapkan praktik dalam konteks budaya yang bermacam-macam.

### **2.2.3 Metode Pekerjaan Sosial**

Praktik pekerjaan sosial menggunakan metode-metode yang terencana. Metode pekerjaan sosial adalah suatu prosedur kerja yang teratur dan dilaksanakan secara sistematis digunakan oleh pekerja sosial dalam memberikan pelayanan sosial. Menurut Adi (2005:141) metode yang digunakan oleh pekerjaan sosial adalah sebagai berikut:

1. Social Casework (Terapi Individu dan Keluarga)  
Metode perubahan sosial terencana pada individu dan keluarga pada dasarnya adalah suatu upaya untuk memperbaiki keberfungsian sosial dari kelompok sasaran perubahan yang mempunyai masalah.
2. Social Group Work (Bimbingan Sosial Kelompok)  
Metode perubahan sosial terencana pada kelompok disebut dengan metode groupwork. Bimbingan sosial kelompok adalah suatu pelayanan kepada kelompok yang tujuan utamanya untuk membantu anggota kelompok mempengaruhi fungsi sosial, pertumbuhan atau perubahan anggota kelompok.
3. Metode Pengorganisasian dan pegen Pengembangan Masyarakat  
Metode pengorganisasian dan pengembangan masyarakat merupakan model intervensi yang diarahkan pada upaya perubahan masyarakat di tingkat yang lebih luas. Pengembangan masyarakat sebagai suatu gerakan yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup keseluruhan komunitas melalui partisipasi aktif, dan jika memungkinkan, berdasarkan inisiatif masyarakat.

#### **2.2.4 Peran-peran Pekerjaan Sosial**

Peran-peran pekerjaan sosial tentunya sangat banyak yang bisa dilakukan oleh *community worker* ketika melakukan intervensi komunitas (Adi, 2015:255-259). Meskipun demikian secara konvensional, sekurang-kurangnya ada tujuh peran yang sering kali diadopsi dan dikembangkan, yaitu sebagai berikut:

##### **A. Pernercepat Perubahan (*Enabler*)**

Sebagai *enabler* seorang pekerja sosial membantu masyarakat agar dapat mengartikulasikan kebutuhan mereka; mengidentifikasi masalah

mereka; dan mengembangkan kapasitas mereka agar dapat menangani masalah yang mereka hadapi secara efektif.

B. Perantara (*Broker*)

Peran ini berkaitan erat dengan upaya menghubungkan individu ataupun kelompok dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan ataupun layanan masyarakat.

C. Pendidik (*Educator*)

Pekerja sosial dalam peran ini diharapkan mempunyai kemampuan menyampaikan informasi dengan baik dan jelas, serta mudah ditangkap oleh komunitas yang menjadi sarana perubahan. Dalam peran ini pekerja sosial diharuskan untuk selalu belajar, hal ini tentunya agar selalu *up-to-date* dengan fenomena yang terjadi di masyarakat.

D. Tenaga Ahli (*Expert*)

Dalam peran ini pekerja sosial diharapkan dapat memberikan masukan, saran dan dukungan informasi dalam berbagai area. Seorang *expert* harus menyadari saran dan usulan yang diberikan kepada klien tidak mutlak harus dikerjakan, tapi sebagai bahan pertimbangan masyarakat atau organisasi dalam pengambilan keputusan.

E. Perencana Sosial (*Social Planner*)

Seorang perencana sosial dalam pekerjaan sosial mengumpulkan data mengenai masalah sosial yang terdapat dalam komunitas; menganalisisnya; dan menyajikan alternatif tindakan yang rasional untuk menangani masalah.

#### F. Advokat

Peran ini dalam pekerjaan sosial dicangkok dari profesi hukum. Peran advokat pada satu sisi berpijak pada tradisi pembaruan sosial, dan sisi lainnya berpijak pada tradisi pelayanan sosial. Dalam peran ini, seorang pekerja sosial aktif dan terarah menjalankan fungsi advokasi atau pembelaan yang mewakili kelompok masyarakat yang membutuhkan suatu bantuan ataupun layanan.

#### G. Aktivis (*Activist*)

Peran ini mencoba melakukan perubahan yang mendasar, dan seringkali tujuannya adalah pengalihan sumber daya ataupun kekuasaan pada kelompok yang kurang mendapatkan keuntungan (*Disadvantaged Group*).

### 2.2.5 Tahapan Intervensi Pekerjaan Sosial

Tahapan intervensi yang dilakukan oleh pekerjaan sosial melalui beberapa tahapan. Dalam pelaksanaannya tahapan-tahapan ini disebut dengan tahapan intervensi pekerjaan sosial yang memudahkan pekerjaan sosial dalam melakukan praktiknya. Ada enam tahapan intervensi pekerjaan sosial yaitu sebagai berikut:

#### 1. Tahap EIC (*Engangement, Intake, Contract*)

Tahap awal dalam praktik pertolongan, yaitu kontak awal pekerja sosial bertemu pertama kali dengan klien. Dalam tahapan ini proses yang terjadi adalah pekerja sosial dan klien saling bertukar informasi mengenai apa saja yang akan dibutuhkan klien, pelayanan apa yang akan diberikan

oleh pekerja sosial dalam memenuhi kebutuhan klien dalam upaya pemecahan permasalahan yang sedang klien hadapi. Kotrak yang disepakati setelahnya merupakan tahapan kesepakatan keterlibatan antara pekerja sosial dengan klien dalam jangka waktu tertentu.

## 2. Tahap *Assessment*

Tahap pengungkapan dan pemahaman masalah klien, yang meliputi: bentuk masalah ciri-ciri masalah, ruang lingkup masalah, faktor penyebab masalah, akibat dan pengaruh masalah, upaya pemecahan masalah yang sudah klien lakukan terlebih dahulu, kondisi keberfungsian klien, dan didasarkan hal tersebut dapat ditentukan fokus permasalahan atau akar permasalahan klien.

## 3. Tahap *Plan Of Intervention*

Tahap pemilihan strategis, metode, dan teknik yang disusun dan dirumuskan oleh pekerja sosial berdasarkan pada proses asesmen klien. Bertujuan untuk memecahkan permasalahan klien dengan meliputi serangkaian kegiatan-kegiatan.

## 4. Tahap Intervensi

Tahap pekerjaan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah klien. Dalam pemecahan masalah klien ini hendaknya pekerja sosial melibatkan klien secara aktif dalam berbagai macam rangkaian kegiatan guna menghasilkan perubahan dalam diri klien dan situasi yang sedang dihadapi.

## 5. Tahap Evaluasi

Tahap penilaian terhadap pencapaian yang sudah dicapai oleh klien guna melihat sejauh mana keberhasilan, kegagalan, atau hambatan yang terjadi pada klien selama proses intervensi. Pekerja sosial akan melihat hasil evaluasi tujuan hasil dan tujuan proses klien selama proses pertolongan dilaksanakan.

#### 6. Tahap Terminasi

Tahap ini dilakukan saat tujuan-tujuan yang telah disepakati antara pekerja sosial dan klien dalam kontrak telah dicapai atau disaat terjadinya suatu hambatan dengan alasan-alasan tertentu yang dihadapi pekerja sosial atau klien yang memungkinkan terjadinya pergantian tenaga ahli yang lebih berkompeten dalam penanganan permasalahan guna mencapai keberhasilan pada tujuan proses pertolongan yang diharapkan.

### **2.3 Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat**

#### **2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan merupakan proses dari ketidakadilan menuju keadilan yang bida disebut dengan berdaya. Pemberdayaan mempunyai makna “berdaya” atau memperoleh kekuatan/kemampuan dari suatu komunitas. Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Chamber dalam Hamid (2018:10) adalah “Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable.*”

Pemberdayaan merupakan satu model yang menggabungkan kebutuhan dasar (*basic need*) dengan kebutuhan bersama untuk mencapai satu kesejahteraan bersama (*welfare*). Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah hal yang banyak dibicarakan masyarakat karena terkait dengan kemajuan dan perubahan bangsa ini ke depan apalagi jika dikaitkan dengan skill masyarakat yang masih kurang akan sangat menghambat pertumbuhan ekonomi itu sendiri.

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat yaitu sebuah proses pembangunan untuk memperbaiki situasi dan kondisi yang di mana masyarakat yang akan memulai proses kegiatan sosial tersebut untuk menghasilkan sebuah perubahan.

### **2.3.2 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat**

Pemberdayaan masyarakat tentunya mempunyai maksud tujuan dan manfaat dari setiap pelaksanaan suatu program. Pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses untuk mencapai satu tujuan tertentu, baik itu kesejahteraan, keseimbangan dalam mencapai keadilan sosial di masyarakat tertentu. Menurut Mardikanto (2014:202) tujuan pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Perbaiki kelembagaan (*Better institution*)  
Dengan perbaikan kegiatan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
2. Perbaiki Usaha (*Better business*)  
Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaikan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan
3. Perbaiki pendapatan (*Better income*)

Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.

4. Perbaikan lingkungan (*Better environment*)

Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.

5. Perbaikan kehidupan (*Better living*)

Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.

6. Perbaikan masyarakat (*Better community*)

Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemberdayaan masyarakat yaitu untuk melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek yang ada di dalam masyarakat, sehingga dapat menghasilkan perubahan dan menjadikan kehidupan masyarakat lebih baik dari sebelumnya.

### **2.3.3 Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat**

Prinsip pada umumnya adalah ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan didalam sesuatu hal. Menurut Mathew dalam Mardikanto (2014:105) prinsip adalah sebagai berikut “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten.”

Prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar, bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dhama dan Bhatnagar (1980) mengemukakan prinsip-prinsip pemberdayaan mencakup:

1. Minat dan Kebutuhan, artinya pemberdayaan akan efektif jika selalu mengacu kepada minat dan kebutuhan masyarakat.

2. Organisasi Masyarakat Bawah, artinya pemberdayaan akan efektif jika mampu melibatkan/menyentuh organisasi masyarakat bawah, sejak dari setiap keluarga/kekerabatan.
3. Keragaman Budaya, artinya pemberdayaan harus memperhatikan adanya keragaman budaya. Perencanaan pemberdayaan harus selalu disesuaikan dengan budaya lokal yang beragam.
4. Perubahan Budaya, artinya setiap kegiatan pemberdayaan akan mengakibatkan perubahan budaya.
5. Kerjasama dan Partisipasi, artinya pemberdayaan hanya akan efektif jika mampu menggerakkan partisipasi masyarakat untuk selalu bekerjasama dalam melaksanakan program-program pemberdayaan yang telah dirancang.
6. Demokrasi dan Penerapan Ilmu, artinya dalam pemberdayaan harus selalu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menawar setiap ilmu alternatif yang ingin diterapkan.
7. Belajar sambil Bekerja, artinya dalam kegiatan pemberdayaan harus diupayakan agar masyarakat dapat “belajar sambil bekerja” atau belajar dari pengalaman tentang segala sesuatu yang dikerjakan.
8. Penggunaan Metoda yang sesuai, artinya pemberdayaan harus dilakukan dengan penerapan metoda yang selalu disesuaikan dengan kondisi lingkungan fisik, kemampuan ekonomi dan nilai sosial budaya.
9. Kepemimpinan, artinya penyuluh tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya bertujuan untuk kepentingan/keputusannya sendiri, dan harus mampu mengembangkan kepemimpinan.

10. Spesialis yang terlatih, artinya penyuluh harus benar-benar pribadi yang telah memperoleh latihan khusus tentang segala sesuatu yang sesuai dengan fungsinya sebagai penyuluh.
11. Segenap Keluarga, penyuluh harus memperhatikan keluarga sebagai satu kesatuan dari unit sosial.
12. Kepuasan, artinya pemberdayaan harus mampu mewujudkan tercapainya kepuasan. Adanya kepuasan, akan sangat menentukan keikutsertaan sasaran pada program-program pemberdayaan selanjutnya.

## **2.4 Tinjauan tentang Modal Sosial**

### **2.4.1 Pengertian Modal Sosial**

Istilah modal sosial dikemukakan pertama kali oleh Lyda Judson Hanifan (1916). Konsep modal sosial muncul dari pemikiran bahwa anggota masyarakat tidak mungkin dapat secara individu mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Diperlukan adanya kebersamaan dan kerjasama yang baik dari segenap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Modal sosial bukanlah kekayaan atau uang, tetapi berupa kemauan baik, rasa bersahabat dan kerjasama erat yang membentuk kelompok sosial, baik di dalam sekolah maupun lingkungan sekitar. Menurut Putnam dalam Thomas (2020:1) modal sosial didefinisikan sebagai “Sifat-sifat organisasi sosial, seperti kepercayaan, norma-norma, dan jaringan yang dapat memperbaiki efisiensi masyarakat dengan memfasilitasi tindakan yang terkoordinasi.”

Modal sosial juga dapat didefinisikan sebagai serangkaian nilai dan norma informal yang dimiliki bersama diantara para anggota suatu kelompok

masyarakat yang memungkinkan terjadinya kerjasama (Fukuyama:xii). Tiga unsur utama dalam modal sosial adalah *trust* (kepercayaan), *reciprocal* (timbal balik), dan interaksi sosial. Sedangkan Burt dalam Suparman mendefinisikan bahwa “Modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk melakukan *asosiasi* (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting bukan hanya bagi kehidupan ekonomi akan tetapi juga setiap aspek eksistensi sosial yang lain.”

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa modal sosial pada intinya mendefinisikan bahwa setiap masyarakat atau sekelompok masyarakat tidak mungkin dapat secara individu menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapinya. Oleh sebab itu memerlukan adanya kebersamaan dan kerja sama yang baik dari setiap anggota masyarakat yang berkepentingan untuk mengatasi masalah tersebut. Melalui tiga unsur utama yang dimiliki modal sosial dapat membantu sekelompok masyarakat untuk mengatasi masalah yang ada.

#### **2.4.2 Elemen-Elemen Modal Sosial**

Modal sosial memiliki beberapa elemen-elemen yang dapat dilihat dari perspektif Sosiologi. Elemen-elemen modal sosial itu terdiri dari beberapa hal sebagai berikut:

##### **1. Jaringan Sosial (*Social Network*)**

Jaringan (*networks*) sosial adalah ikatan antar simpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan antar media (hubungan sosial). Jaringan sosial terjadi karena adanya keterkaitan (*connectedness*) antara individu dan

komunitas. Jaringan sosial yang kuat antara sesama anggota dalam kelompok, mutlak diperlukan dalam menjaga sinergi dan kekompakan. Jaringan sosial dalam masyarakat dapat terbentuk sebagai jaringan formal atau jaringan informal. Pada awalnya, jejaring ini terbentuk secara formal melalui hubungan kerja yang diatur sedemikian rupa, namun pada akhirnya melebur menjadi sebuah hubungan simpati timbal balik (misalnya persahabatan). Selain aspek ini, jaringan dapat disusun secara horizontal atau vertikal. Jaringan horizontal menyatukan orang-orang dengan status dan kekuasaan yang sama, dan jaringan vertikal bergabung dengan individu yang berbeda dan berada dalam hubungan hierarki dan ketergantungan yang asimetris. Jaringan horizontal memfasilitasi komunikasi dan meningkatkan distribusi informasi tentang kepercayaan individu. Mereka memungkinkan mediasi dan peningkatan reputasi. Reputasi itu sendiri penting untuk kepercayaan dalam masyarakat yang kompleks (Putnam 2000: 21).

## 2. Kepercayaan (*Trust*)

Sikap saling percaya (*trust*) sebagai salah satu elemen dari modal sosial adalah merupakan sikap saling percaya yang terbangun antar beberapa golongan komunitas dan merupakan dasar bagi munculnya keinginan untuk membentuk jaringan sosial (*networks*) yang akhirnya di mapankan dalam wujud pranata (*institution*). Kepercayaan adalah unsur penting dalam modal sosial yang merupakan perekat bagi langgengnya hubungan dalam kelompok masyarakat. Menurut Putnam kepercayaan adalah elemen utama yang memperluas terbentuknya jaringan sosial dalam

kehidupan masyarakat (Putnam 2000:20-21). Semakin tinggi tingkat rasa saling percaya dalam suatu komunitas, semakin tinggi pula kemungkinan terbentuknya kerjasama yang baik. Kerjasama itu sendiri akan menumbuhkan kepercayaan. Meskipun begitu, kepercayaan yang diperlukan untuk mendukung kerjasama tidaklah buta. Kepercayaan juga berisi prediksi tentang perilaku pihak-pihak di dalamnya. 30 Kepercayaan sosial dalam lingkungan modern yang kompleks dapat tumbuh dari dua sumber yang terikat erat: jaringan keterlibatan sipil dan norma timbal balik.

### 3. Norma

Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohektifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat. Oleh karena itu norma sosial disebut sebagai salah satu modal sosial. Norma terdiri dari pemahaman-pemahaman, nilai-nilai, harapan-harapan, nilai-nilai, dan tujuan-tujuan yang diyakini dan dijalankan bersama oleh sekelompok orang (komunitas).

Di dalam mengembangkan konsep norma timbal balik ini, Putnam mengacu pada konsep norma Coleman yang menyamakan antara norma sosial dengan pengalihan tindakan yang mengontrol hak dari satu pihak terhadap pihak lainnya. Norma yang menciptakan kepercayaan sosial biasanya akan memberikan dampak berupa pengurangan biaya transaksi dan semakin memudahkan kerjasama di antara mereka. Karakteristik terpenting dari norma-norma ini adalah adanya hubungan timbal balik yang berpotensi memberikan keuntungan bagi kedua pihak, baik itu dengan

jumlah yang sama besarnya maupun dalam keadaan dimana salah satu pihak mendapat bagian yang sedikit lebih banyak daripada pihak lainnya. Meskipun demikian, hubungan timbal balik seperti ini umumnya menunjukkan pertukaran barang dengan nilai yang sama. Dalam kasus timbal balik umum, ketidakseimbangan hubungan pertukaran yang berkelanjutan terjadi setiap saat (Putnam 2000:172).

### **2.4.3 Unsur-unsur dalam Modal Sosial**

Selain adanya elemen-elemen modal sosial juga mempunyai beberapa unsur-unsur. Unsur dari modal sosial akan menghasilkan seberapa besar kemampuan masyarakat atau asosiasi untuk bekerja sama membangun suatu jaringan untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Dijelaskan dalam Hasbullah (2006) unsur-unsur pokok dari modal sosial sebagai berikut:

a. Partisipasi dalam suatu jaringan

Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan akan terletak pada kecenderungan yang tumbuh dalam suatu kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan kuat tergantung pada kapasitas yang ada dalam kelompok masyarakat untuk membangun sejumlah asosiasi berikut membangun jaringannya.

b. *Reciprocity*

Modal sosial selalu diwarnai oleh kecenderungan saling tukar kebaikan antar individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu

sendiri. Seseorang atau banyak orang dari suatu kelompok memiliki semangat membantu yang lain tanpa mengharapkan imbalan seketika.

c. *Trust*

*Trust* atau percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya (Putnam,2002).

d. Norma Sosial

Norma sosial akan sangat berperan dalam mengontrol bentuk-bentuk perilaku yang tumbuh dalam masyarakat. Norma-norma biasanya terinstitusionalisasi dan mengandung sanksi sosial yang dapat mencegah individu berbuat sesuatu yang menyimpang dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

e. Nilai-nilai

Nilai adalah sesuatu ide yang telah turun-temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Modal sosial yang kuat juga ditentukan oleh konfigurasi nilai yang tercipta pada suatu kelompok masyarakat.

f. Tindakan yang Proaktif

Salah satu unsur penting modal sosial adalah keinginan yang kuat dari para anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan mereka dalam suatu kegiatan masyarakat.

Ide dasar dari *premise* ini bahwa seseorang atau kelompok senantiasa kreatif dan aktif.

#### **2.4.4 Fungsi Modal Sosial**

Modal sosial merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama. Modal sosial mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Alat untuk menyelesaikan konflik yang ada di dalam masyarakat.
2. Memberikan kontribusi tersendiri bagi terjadinya integrasi sosial.
3. Membentuk solidaritas sosial masyarakat dengan pilar kesukarelaan,
4. Membangun partisipasi masyarakat.
5. Sebagai pilar demokrasi.
6. Menjadi alat tawar menawar.

### **2.5 Tinjauan tentang Stunting**

#### **2.5.1 Pengertian Stunting**

Prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting perlu ditangani segera. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan 30,8% atau sekitar 7 juta balita menderita stunting. Masalah gizi lain terkait dengan stunting yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat adalah anemia pada ibu hamil (48,9%), Berat Bayi Lahir Rendah atau BBLR (6,2%), balita kurus atau wasting (10,2%) dan anemia pada balita. Stunting adalah

kondisi tinggi badan seseorang lebih pendek dibanding tinggi badan orang lain pada umumnya (yang seusia). Stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk sesuaminya. Konsekuensi kritis dari stunting telah menyebabkan penetapan target gizi global untuk mengurangi jumlah balita stunting sebesar 40% pada tahun 2025 (WHO, 2014). Pengertian stunting menurut Kementerian Kesehatan RI (2018) yaitu “Stunting adalah kondisi balita yang memiliki panjang atau tinggi badan yang kurang jika dibandingkan dengan umur. Balita stunting di masa yang akan datang akan mengalami kesulitan mencapai perkembangan fisik dan kognitif yang optimal.”

Stunting atau pertumbuhan linier yang buruk (skor tinggi-untuk-usia-Z 2) dianggap sebagai masalah umum masalah kesehatan di kalangan anak-anak secara global (*United Nations Children's Fund*, 2004). Anak stunting dipengaruhi oleh gizi buruk di dalam rahim dan anak usia dini, serta sering infeksi sebelum atau setelah lahir dan karena itu memiliki risiko lebih besar untuk sakit dan kematian (WHO, 2018).

Definisi diatas dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan suatu kondisi dimana anak atau balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan anak-anak atau balita yang seusianya dan juga anak atau balita yang terkena stunting memiliki asupan gizi yang kurang sehingga perlu sangat diperhatikan anak-anak atau balita yang terkena stunting.

### **2.5.2 Faktor Penyebab Stunting**

Stunting pada anak atau balita merupakan konsekuensi dari beberapa faktor yang sering dikaitkan dengan kemiskinan termasuk gizi, sanitasi dan lingkungan (KemenKes RI,2013). Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya stunting yaitu:

1. Faktor Keluarga dan Rumah Tangga

Faktor maternal, dapat disebabkan karena nutrisi yang buruk selama prekonsepsi, kehamilan, dan laktasi. Selain itu juga dipengaruhi perawakan ibu yang pendek, infeksi, kehamilan muda, kesehatan jiwa, IUGR dan persalinan prematur, jarak persalinan yang dekat, dan hipertensi.

2. *Complementary Feeding* yang tidak akurat

Setelah umur 6 bulan, setiap bayi membutuhkan makanan lunak yang bergizi sering disebut Makanan Pendamping Asi (MP-ASI). Pengenalan dan pemberian MP-ASI harus dilakukan secara bertahap baik bentuk maupun jumlahnya, sesuai dengan kemampuan pencernaan bayi/anak. Kualitas makanan yang buruk meliputi kualitas *micronutrient* yang buruk, kurangnya keragaman dan asupan pangan yang bersumber dari pangan hewani, kandungan tidak bergizi, dan rendahnya kandungan energi pada *complementary foods*.

3. Beberapa Masalah dalam Pemberian ASI

Rendahny kesadaran Ibu akan pentingnya memberikan ASI pada balitanya dipengaruhi oleh pengetahuan ibu tentang kesehatan dan sosio-kultural, terbatasnyaa petugas kesehatan dalam memberikan penyuluhan, tradisi daerah berpengaruh terhadap pemberian makanan pendamping ASI

yang terlalu dini, dan tidak lancarnya ASI setelah melahirkan. Masalah-masalah terkait praktik pemberian ASI meliputi *delayed intitation*, tidak menerapkan ASI eksklusif, dan penghentian dini konsumsi ASI.

#### 4. Infeksi

Penyebab langsung malnutrisi adalah diet yang tidak adekuat dan penyakit. Manifestasi malnutrisi ini disebabkan oleh perbedaan antara jumlah zat gizi yang diserap dari makanan dan jumlah zat gizi yang diserap dari makanan dan jumlah zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Hal ini terjadi sebagai konsekuensi dari terlalu sedikit mengkonsumsi makanan atau mengalami infeksi, yang meningkatkan kebutuhan tubuh akan zat gizi, mengurangi nafsu makan, atau mempengaruhi penyerapan zat gizi di usus.

#### 5. Kelainan Endokrin

Pada dasarnya perawakan pendek dibagi menjadi dua yaitu variasi normal dan keadaan patologis. Kelainan endokrin dalam faktor penyebab terjadinya stunting berhubungan dengan defisiensi GH, IGF- 1, hipotiroidisme, kelebihan glukokortikoid, diabetes melitus, diabetes insipidus, rickets hipopostamemia.

### **2.5.3 Upaya Pencegahan Stunting**

Balita pada saat usia 0-2 tahun atau usia di bawah tiga tahun (batita) merupakan periode emas (*Golden Age*) untuk pertumbuhan dan perkembangan anak, karena pada masa tersebut terjadi pertumbuhan yang sangat pesat. Gagal tumbuh pada periode ini akan mempengaruhi status gizi dan kesehatan pada usia dewasa. Berbagai upaya telah dilakukan dalam mencegah dan menangan

masalah gizi di masyarakat. Kejadian balita stunting dapat diputus mata rantainya sejak janin dalam kandungan dengan cara melakukan pemenuhan kebutuhan gizi bagi ibu hamil, artinya setiap ibu hamil harus mendapatkan makanan yang cukup gizi, mendapatkan suplementasi zat gizi, dan terpantau kesehatannya.

Perlu dilakukan upaya-upaya pencegahan stunting mengingat tingginya prevalensi stunting di Indonesia. Pemerintah telah menetapkan kebijakan pencegahan stunting, melalui Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi dengan fokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan, yaitu sebagai berikut:

1. Ibu hamil mendapat Tablet Tambah Darah (TTD) minimal 90 tablet selama kehamilan
2. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) ibu hamil
3. Pemenuhan Gizi
4. Persalinan dengan dokter atau bidan yang ahli
5. Pemberian Insiasi Menyusui Dini (IMD)
6. Pemberian Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan.
7. Memberikan Makanan Pendamping ASI (MP-ASI) untuk bayi diatas 6 bulan hingga 2 tahun
8. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A
9. Pemantauan pertumbuhan balita di posyandu terdekat

## 10. Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)

### 2.5.4 Dampak Stunting

Dampak yang terjadi akibat dari stunting yaitu ditimbulkan oleh masalah gizi, dalam jangka pendek adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik, dan gangguan metabolisme dalam tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang akibat yang dapat ditimbulkan adalah menurunnya kemampuan kognitif dan prestasi belajar, menurunnya kekebalan tubuh sehingga mudah sakit, dan risiko yang tinggi munculnya penyakit-penyakit seperti diabetes, kegemukan, penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker, stroke, dan disabilitas pada usia lanjut, serta kualitas kerja yang tidak kompetitif yang berakibat pada rendahnya produktivitas ekonomi (Kemenkes R.I, 2016).

Stunting pada anak juga menjadi faktor risiko terhadap kematian, perkembangan motorik yang rendah, kemampuan berbahasa yang rendah, dan ketidakseimbangan fungsional. Stunting pada anak juga dapat menyebabkan rusaknya fungsi kognitif sehingga anak mengalami permasalahan dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara optimal.